

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al Qur'an dan Hadist. Sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang terlahir dari hasil pergejolakan pemikiran pendirinya. Sebagai sebuah organisasi yang pada hakekatnya merupakan Gerakan, Muhammadiyah memiliki tujuan, disamping usaha kerjasama dan sekelompok orang yang disebut anggota Persyarikatan, yang bekerja melaksanakan usaha tersebut untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Sejak berdirinya pada 1912, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah. Haidar Nashier menyebutkan Muhammadiyah tidak berjuang di lapangan politik serta tidak memiliki hubungan apa pun dengan kekuatan politik mana pun di negeri ini. Bersama berjalannya waktu Muhammadiyah terus membentengi dirinya dengan apa yang disebut "khittah" (garis perjuangan) yang telah mendarah daging dalam persyarikatan ini.

Meskipun demikian Muhammadiyah menyadari dalam perjalanannya tidak lepas dari pengaruh dan tarikan politik. Kondisi politik tertentu memang selalu memberikan tekanan bahkan paksaan tertentu kepada Muhammadiyah untuk melahirkan "ikhtiar" atau "tajdid politik". Fakta sejarah telah memperlihatkan bahwa organisasi ke masyarakatan dimasuki oleh politik, kendati antara satu organisasi Islam dengan lainnya memiliki keberagaman pola dalam memainkan peran politiknya. Dunia politik telah memberikan tekanan atau paksaan tertentu

untuk mengambil peran politik. Baik untuk mencegah kedaruratan seperti himbauan untuk tidak memilih partai politik tertentu yang merugikan umat Islam maupun pertimbangan untuk kemaslahatan umat, bangsa dan Muhammadiyah sendiri seperti dalam sejumlah kasus tuntutan politik itu selalu ada. Namun secara umum Muhammadiyah tetap berada dalam garis utama sebagai gerakan dakwah dan tajdid dilapangan ke masyarakatan.

Dalam hal perkembangan Muhammadiyah di Sumatera utara, Muhammadiyah merupakan sebuah kekuatan tersendiri dalam membangun Sumatera Utara. Melalui amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah Sumatera Utara, secara tidak langsung sebenarnya membantu program dari pemerintah Sumatera Utara.

Menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2013 ini, kiranya dengan kebijakan yang di keluarkan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu mengambil sikap netral terhadap para calon yang akan maju. Bukan berarti Muhammadiyah tidak peduli terhadap pesta demokrasi lokal yang terselenggara, tetapi Muhammadiyah mencoba membangunya melalui kerja-kerja kultural dengan cara pendidikan dan penyadaran politik terhadap anggotanya. Keputusan rapat pimpinan wilayah ini bukan hanya sebatas mengambil posisi netral saja dalam pemilihan gubernur mendatang, tetapi juga mengeluarkan instruksi kepada anggotanya untuk memilih calon gubernur yang beragama Islam dan wakil gubernur yang beragama Islam juga. Kebijakan mengambil posisi netral ini menegaskan kembali bahwa Muhammadiyah Sumatera Utara ingin memposisikan diri sebagai sebuah lembaga yang netral dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara.

B. Saran

Adapun beberapa saran penulis untuk Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menjalankan aktivitasnya kedepan antara lain : *Pertama*, menata dan mengkonsolidasi kembali seluruh amal usaha sebagai alat/kepanjangan misi Persyarikatan sekaligus ajang kaderisasi Muhammadiyah, termasuk menyeleksi dan membina seluruh orang yang berkiprah di dalamnya, sehingga amal usaha itu benar-benar mengikatkan, memposisikan, dan memfungsikan diri sebagai milik Muhammadiyah, dan bukan milik mereka yang berada di amal usaha apalagi milik organisasi lain; yang harus dikelola dengan sistem dan disiplin organisasi Muhammadiyah; *Kedua*, Bertindak tegas terhadap setiap anggotanya yang memiliki rangkap jabatan antara partai politik dan amal usaha Muhammadiyah; *Ketiga*, Melakukan pendidikan politik yang Islami terhadap anggotanya, terutama yang menduduki lembaga-lembaga kenegaraan; *Keempat*, Dalam mengeluarkan kebijakan hendaknya Muhammadiyah Sumatera utara merumuskannya melalui kriteria-kriteria atau unsur-unsur yang sangat mendetail dan mudah di terjemahkan anggota.

Tidak ada analisis yang bersifat *final* dalam ilmu sosial karena pada umumnya kajian seperti ini bersifat *interpretative*. Seseorang dapat saja tidak setuju dengan bentuk kajian dan analisis yang diajukan penulis. Meskipun demikian, besar harapan penulis bahwa skripsi ini tetap memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami politik Islam di Indonesia khususnya Sumatera Utara.